

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikutip adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Politik Dinasti**

###### **2.1.1.1 Pengertian Politik Dinasti**

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “*politikos*” yang berarti untuk, dari atau bersangkutan dengan warga negara. Sedangkan dinasti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keturunan raja-raja yang berkuasa, semua berasal dari satu keluarga yang sama.

Menurut (Nuritomo & Rossieta, 2014), definisi politik dinasti adalah sebagai berikut:

“Perluasan ataupun perpindahan kekuasaan pada level eksekutif seperti kepala daerah yang dilakukan dalam suatu keluarga, baik keluarga sedarah maupun semenda.”

Menurut (Amelia, 2015), definisi politik dinasti adalah sebagai berikut:

“Serangkaian strategi politik yang dipraktikan oleh suatu oknum untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan yang telah diraih oknum tersebut tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada pihak lain yang memiliki pertalian keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya.”

Menurut (Purwaningsih, 2015), definisi politik dinasti adalah sebagai berikut:

“Politik dinasti adalah kegiatan rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga dengan menempati jabatan politik atau pemerintahan yang tidak bersandarkan pada kompetensi maupun kebijakan yang telah ditentukan. Akan tetapi lebih berdasarkan atas rekomendasi hubungan paguyuban baik karena turunan ataupun perkawinan.”

Menurut (Querubin, 2016), definisi politik dinasti adalah sebagai berikut:

“Politik dinasti adalah sekelompok keluarga yang menikmati keunggulan elektoral atas kandidat lain, yang memungkinkan anggota keluarga ini memegang jabatan terpilih selama beberapa generasi.”

Menurut (Mendoza, 2012), definisi politik dinasti adalah sebagai berikut:

“Politik dinasti adalah suatu susunan politik yang mana individu dari keluarga yang sama menduduki posisi terpilih baik secara estafet untuk posisi yang sama, atau secara berbarengan di berbagai posisi”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa politik dinasti adalah suatu kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan, baik karena hubungan darah, garis keturunan

atau karena adanya ikatan pernikahan demi mempertahankan kekuasaan di suatu daerah. Bentuknyapun beragam biasanya berupa jabatan politik seperti kepala daerah yang terkesan diwariskan secara turun temurun, baik dari orangtua ke anak, suami ke istri maupun dari mertua ke menantu (Nuritomo dan Rossieta, 2014; Amelia, 2015; Purwaningsih, 2015; Querubin, 2016; Mendoza, 2012).

### **2.1.1.2 Faktor-faktor Terbentuknya Politik Dinasti**

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni dalam Republik.co.id oleh Febrianto Adi Saputro mengidentifikasi setidaknya ada empat faktor penyebab munculnya politik dinasti diantaranya, regulasi atau kaidah hukum yang lemah, partai politik yang belum demokratis, mahal biaya politik dan rendahnya kesadaran masyarakat. Faktor-faktor penyebab lahirnya politik dinasti lainnya yaitu karena adanya saluran tertentu, dalam kasus ini adalah keluarga. Dengan pengenalan nama keluarga ada kecondongan untuk membentuk sebuah dinasti keluarga pada lembaga pemerintahan. Adanya pengaruh positif variabel independen masa jabatan kekuasaan politik terhadap pembentukan politik dinasti juga membuktikan masa jabatan mempunyai efek jangka panjang dalam pembentukan politik dinasti (Rossi, 2013).

Selain itu langgengnya jabatan politik dinasti juga terbentuk karena elit-elit lama yang mendorong sanak saudara mereka untuk memegang kekuasaan 'secara demokratis' dengan mempersiapkan pendidikan dan rekrutmen politik secara dini. Sehingga kemunculannya seakan-akan disebabkan oleh faktor

kepolitikan yang wajar bukan karena faktor darah atau keluarga Clubok, Wilensky dan Berghorn dalam (Pasan, 2013).

Sementara itu adanya semangat yang kuat untuk mempertahankan politik dinasti melalui keluarga yang mana kegigihan dalam menanggung proses pembentukan politik dinasti tersebut telah memperlemah sistem demokrasi. Sehingga prevalence politik dinasti tidak hanya disebabkan oleh keberadaan keluarga yang berkuasa, tetapi sistem politik yang telah menciptakan keberlangsungan dinasti itu sendiri (Querubin, 2016).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor terbentuknya politik dinasti adalah karena calon pemimpin yang akan mengikuti pemilu telah memiliki jalur dari keluarga berupa popularitas nama keluarga yang pernah menjabat sebelumnya, lama jabatan yang dikuasai oleh anggota keluarga sebelumnya dan dari sistem pemerintahannya sendiri yang membiarkan praktik ini berkembang ( Rossi, 2013; Pasan, 2013; Querubin, 2016).

### **2.1.1.3 Dampak Politik Dinasti**

Diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni dalam Republik.co.id oleh Febrianto Adi Saputro bahwa pada praktiknya politik dinasti ini cenderung destruktif. Politik dinasti dianggap mempunyai dampak negatif terhadap sosio-ekonomi pada pemerintahan yang demokratis sebab demokrasi seharusnya menjamin kesetaraan dalam partisipasi politik, namun hadirnya politik dinasti telah memengaruhi legitimasi demokrasi tersebut (Arthur, Ferraz, & Rios, 2015).

Dampak politik dinasti juga berpotensi untuk menghambat pembangunan ekonomi dan melemahkan kompetisi dalam pemilu. Daerah yang berada di bawah kendali politik dinasti cenderung kurang efektif dalam mendatangkan pembangunan ekonomi kepada masyarakat, sekalipun mereka menerima pendanaan yang lebih dari pemerintah pusat (Asako, Ueda, & Matsubayashi, 2015). Selain itu keberadaan politik dinasti juga mempersulit untuk menambah calon pemimpin alternatif baru bagi rakyat karena politik dinasti mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memenangkan pemilu sehingga kepala daerah yang terpilih memiliki kualitas rendah (Querubin, 2016).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa politik dinasti ini lebih banyak membawa dampak yang negatif berupa kurangnya alternatif pemimpin yang dapat dipilih rakyat, melemahkan kompetisi dalam pemilu karena calon dari politik dinasti yang memiliki peluang untuk menang lebih besar dan kurang efektif dalam pembangunan ekonomi (Arthur, Ferraz, & Rios, 2015; Asako, Ueda, & Matsubayashi, 2015; Querubin, 2016).

### **2.1.2 Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal terdiri dari dua kata yaitu desentralisasi dan fiskal. Desentralisasi menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan fiskal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pendapatan negara atau yang dikenakan dengan urusan pajak.

Menurut (Fotanella & Rossieta, 2014), definisi desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

“Sistem distribusi anggaran dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, gunanya untuk membantu tugas atau fungsi pemerintah pusat dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kewenangan bidang pemerintah yang diberikan.”

Menurut (Maryanti, 2012), definisi desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

“Faktor penting dalam proses manajemen keuangan daerah. Dengan desentralisasi fiskal maka suatu daerah akan mempunyai kemandirian dalam mengalokasikan belanja daerah dan aktivitas pembangunan di daerah tanpa harus tergantung kepada pemerintah pusat.”

Menurut (Moisiu, 2013), definisi desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

“Transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan kestabilan sistem demokrasi, meningkatkan efektifitas dan efisiensi, merangsang pembentukan pengembangan ekonomi daerah dan nasional, meningkatkan transparansi pemerintahan dan juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan.”

Menurut (Colfer, 2006), definisi desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

“Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan, hak untuk mendapat transfer dari pemerintah dan kebebasan untuk menentukan belanja rutin ataupun investasi.”

Menurut (Elmi, 2005), definisi desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

“Kewenangan yang diberikan dalam bidang penerimaan keuangan baik itu secara pendayagunaan ataupun administrasinya dan secara mekanisme desentralisasi fiskal adalah transfer dana dari APBN ke daerah agar ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dapat terwujud serta dapat memberi stimulus pada kegiatan masyarakat di dalam perekonomiannya.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kekuasaan dari pusat ke daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelayanan publik (Fotanella dan Rossieta, 2012; Maryanti, 2012; Moisiu, 2013; Colfer, 2016; Elmi, 2005).

#### **2.1.2.1 Tujuan Desentralisasi Fiskal**

Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kebijakan desentralisasi fiskal bertujuan untuk:

1. Menyelaraskan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainable*)
2. Memperkecil ketimpangan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*)
3. Mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*)
4. Meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (demokrasi)

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*), meningkatkan kualitas pelayanan publik daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro (Mardiasmo, 2009).

Tidak jauh berbeda, (Makhfudz, 2002), menjelaskan tujuan desentralisasi fiskal antara lain adalah untuk mengurangi beban pemerintahan pusat dari campur tangan masalah di tingkat daerah, meningkatkan dukungan rakyat dalam kegiatan pembangunan sosial ekonom, penyusunan program untuk perbaikan sosial ekonomi tingkat daerah sehingga lebih realistis, melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusannya sendiri dan pembinaan kesatuan nasional.

#### **2.1.2.2 Proksi Mengukur Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal secara umum dapat memengaruhi kesempatan daerah untuk memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, terutama jika dilihat dari aspek kemandirian daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Fotanella & Rossieta, 2014).

Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian kali ini desentralisasi fiskal akan diukur menggunakan dua proksi yaitu melalui tingkat kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat.

## 1. Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah adalah kesanggupan pemerintah daerah dalam mengurus sendiri pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar kewajiban pajak dan retribusi sebagai sumber dana yang diperlukan daerah Halim & Kusufi (2012:101). Kemandirian daerah juga dapat diartikan sebagai kemampuan daerah dalam menggali sumber pendanaan daerah yang dihitung dengan membandingkan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat serta pinjaman daerah. Kemandirian daerah juga digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya (Mahmudi, 2016).

Penelitian sebelumnya yang menggunakan rumus PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah untuk mengukur kemandirian daerah adalah penelitian (Fotanella & Rossieta, 2014). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengukur tingkat kemandirian daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kemandiran Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## 2. Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Menurut Bisma, Gede, & Susanto (2010:78), definisi ketergantungan pada pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

“Ukuran tingkat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendanaan kegiatan pembangunan daerah melalui PAD, yang dihitung dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”

Rasio ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diukur dengan membandingkan jumlah dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima dengan total penerimaan daerah, agar PAD dapat dijadikan sebagai bagian sumber keuangan terbesar Mahmudi (2016:140). Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Nurhayati, 2015)..

Penelitian terdahulu yang digunakan oleh (Fotanella & Rossieta, 2014), cara untuk mengukur ketergantungan pada pemerintah pusat adalah dengan menjumlahkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibagi dengan total pendapatan daerah. Begitu pula penelitian yang dilakukan (Mudhofar & Tahar, 2016). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengukur tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ketergantungan pada Pemerintah Pusat} = \frac{\text{DAU} + \text{DAK}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

### 2.1.3 Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 salah satu poin penting untuk mendukung terciptanya *good governance* adalah dengan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas keuangan memiliki fokus utama pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, biasanya tercermin melalui laporan yang telah di audit secara profesional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, audit keuangan yang dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan telah diungkapkan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hasil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di audit oleh BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

LHP ini menggambarkan tingkat akuntabilitas LKPD secara keseluruhan dan merangkumnya dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan sebanyak dua kali setiap tahun atau setiap semester dan disajikan salah satunya dalam bentuk opini audit.

- Opini Pemeriksaan Keuangan

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor, yaitu:

- a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berisi pernyataan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang diterapkan dalam SKPN. BPK dapat mengeluarkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) karena keadaan tertentu yang mengharuskan auditor untuk memasukkan paragraf penjelasan ke dalam LHP.

b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP dalam semua hal yang material, kecuali dampak dari hal-hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

c. Tidak Wajar (TW)

Berisi pernyataan bahwa laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan SAP dalam semua hal yang material.

d. Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Pernyataan Menolak Memberikan Opini

Menunjukkan bahwa auditor tidak memberikan opini audit atas laporan keuangan.

Penelitian yang menggunakan opini untuk melihat Akuntabilitas laporan keuangan adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fotanella & Rossieta, 2014), (Irmawati, Febrian, & Pratolo, 2015), (Anggraini, Ragil, & Riharjo, 2017), (Susilo & Pratolo, 2018), dan (Saud & Trisha, 2020).

### 2.1.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi dari peneliti terdahulu yang bersumber dari beberapa jurnal ilmiah mengenai akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya:

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Nuritomo dan Hilda Rossieta (2014)	Politik Dinasti, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	<b>Variabel Bebas:</b> Politik Dinasti  <b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pada ukuran kinerja lainnya desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan pada akuntabilitas.
2	Nikma Ragil Anggraini dan Ikhsaan Budi Riharjo (2017)	Pengaruh Politik Dinasti terhadap Akutabilitas Pemerintahan dengan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Pemoderasi	<b>Variabel Bebas:</b> Politik Dinasti  <b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas Pemerintah dan Kinerja Keuangan	Praktik politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik.
3	Tri Susilo Wahyu Aji dan Suryo Pratolo (2018)	Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015	<b>Variabel Bebas:</b> Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal  <b>Variabel Terikat:</b> Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi	Praktik Politik Dinasti tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja pemerintahan serta Akuntabilitas tidak terbukti memediasi hubungan antara Politik Dinasti dan SPI terhadap Kinerja pemerintahan.

4	Ilham Maulana Saud dan Gisti Fairus Trisha (2020)	Desentralisasi Fiskal, Politik Dinasti, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan: Bukti Empiris di Indonesia	<p><b>Variabel Bebas:</b> Kemandirian Daerah, Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Efektivitas Keuangan, Politik Dinasti, Jumlah Pelanggaran Internal, Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p><b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Ketergantungan pada pemerintah pusat dan politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel kemandirian daerah dan efektivitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5	Amy Fontanella dan Hilda Rossieta (2014)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	<p><b>Variabel Bebas:</b> Desentralisasi Fiskal dan Kinerja</p> <p><b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas.
6	Surya Pratolo dan Fenrian Diah Irmawati (2020)	Determinan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Tinjauan Pada Kinerja dan Politik di Pemerintahan Daerah di Indonesia	<p><b>Variabel Bebas:</b> Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat, Politik Dinasti dan Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p><b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah</p>	Kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Ketergantungan daerah berpengaruh secara negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Politik dinasti tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dari pelaporan keuangan daerah

7	Yasushi Asako, Takeshi Iida, Tetsuya Matsubayashi dan Michiko Ueda (2015)	<i>Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan</i>	<b>Variabel Bebas:</b> <i>Dynastic Politicians</i>  <b>Variabel Terikat:</b> <i>Electoral competitiveness and policy choices</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang terindikasi politik dinasti menerima distribusi yang lebih besar daripada daerah yang tidak terindikasi politik dinasti, namun demikian peningkatan transfer tidak berjalan lurus dengan kinerja ekonomi di daerah tersebut.
8	Arthur Braganca, Claudio Ferraz dan Juan Rios (2015)	<i>Political Dynasties and the Quality of Government</i>	<b>Variabel Bebas:</b> <i>Political Dynasties</i>  <b>Variabel Terikat:</b> <i>The Quality of Government</i>	Politisi dinasti menghabiskan lebih banyak sumber daya, terutama dalam bidang investasi infrastruktur perkotaan, kesehatan dan sanitasi. Tetapi, tidak ditemukan perbaikan ekonomi dan perubahan kualitas pelayanan publik.
9	Kurniatul Mudhofar dan Afrizal Tahar (2016)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja	<b>Variabel Bebas:</b> Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Pemda  <b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah	Kemadirian daerah dan kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda. Sementara ketergantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda.
10	Rita Friyani (2017)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	<b>Variabel Bebas:</b> Desentralisasi Fiskal, <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintah  <b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas	Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, <i>Good Governance</i> tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi, Standar Akuntansi

		Kota Jambi	Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
11	Vinda Erryana dan Hendri Setyawan (2016)	Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah se- Jawa Tengah)	<b>Variabel Bebas:</b> Kemandirian, Ketergantungan, Rasio Efektivitas, Rasio Belanja Operasional, Rasio Belanja Modal, Status Dareh  <b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ketergantungan Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
12	Muraiya dan Nadirsyah (2018)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektifitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	<b>Variabel Bebas:</b> Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektifitas Penyerapan Anggaran  <b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. efisiensi penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
13	Heppy Purbasari dan Andy Dwi Bayu Bawono (2017)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan	<b>Variabel Bebas:</b> Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah	Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Akuntabilitas Laporan

			<p><b>Variabel Terikat:</b> Akuntabilitas Laporan Keuangan</p>	<p>Keuangan Daerah. Kinerja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.</p>
14	Jean Paul Faguet (2014)	<i>Decentralization and Governance</i>	<p><b>Variabel Bebas:</b> <i>Decentralization</i></p> <p><b>Variabel Terikat:</b> <i>Governance (increase political competition, improve public accountability, reduce political instability)</i></p>	<p>Desentralisasi mendukung pemerintahan yang akuntabel, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi tanpa transparansi desentralisasi dapat melemahkan akuntabilitas politik &amp; stabilitas ekonomi.</p>
15	Maria Escobar-Lemmon dan Ashley D. Ross (2014)	<i>Does Decentralization Improve Perceptions of Accountability? Attitudinal Evidence from Colombia</i>	<p><b>Variabel Bebas:</b> <i>Administrative, fiscal, and political decentralization, controlling for participation, political knowledge</i></p> <p><b>Variabel Terikat:</b> <i>Perceptions of accountability</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi administratif dan fiskal akan meningkatkan persepsi akuntabilitas, tetapi desentralisasi politik tidak.</p>
16	Chih-hung Liu (2007)	<i>What Type Of Fiscal Decentralization System Has Better Performance?</i>	<p><b>Variabel Bebas:</b> <i>Fiscal Decentralization</i></p> <p><b>Variabel Terikat:</b> <i>Economic performance</i></p>	<p>Beberapa negara mendapat manfaat dari desentralisasi fiskal dan beberapa negara lainnya dengan tingkat desentralisasi yang tinggi telah menderita krisis ekonomi. Desentralisasi fiskal yang paling komprehensif yaitu, COMP FDS dimana SNG memiliki otoritas peminjaman dan perpajakan, dan memiliki rasio SNG yang tinggi.</p>

17	Tao Zhang dan Heng-fu Zou (1998)	<i>Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China</i>	<b>Variabel Bebas:</b> <i>Fiscal decentralization, public spending</i>  <b>Variabel Terikat:</b> <i>Economic growth in China</i>	Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.
----	----------------------------------	---	--	--

## 2.2. Kerangka Pemikiran

*Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi (*Agency Theory*) secara alami, masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang berlawanan antara dua belah pihak atau lebih. Pada permasalahan ini pemerintah bertindak sebagai *agent* dan rakyat sebagai *principal*.

Asumsi dari teori ini adalah hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi (*asymmetrical information*) atau ketidakseimbangan informasi karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi lebih mumpuni dibandingkan dengan *principal*. Adanya asimetri ini mendorong *agent* untuk melakukan tindak kecurangan seperti menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*, contohnya *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Adanya asimetri informasi ini menyebabkan kemungkinan munculnya konflik antara pihak *principal* dan *agent*. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa bupati dan walikota dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan petanggungjawaban program pemerintah. Proses pemilihan agen bersifat demokratis sesuai dengan amanat UU Nomor 23

Tahun 2014 yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja agen dalam meningkatkan kesejahteraan prinsipal masih menyisakan masalah, salah satunya adalah masalah politik dinasti (Anggraini, Ragil, & Riharjo, 2017).

Selain *agency theory* penelitian ini juga menggunakan teori sinyal (*signalling theory*). Teori sinyal menjelaskan bahwa laporan keuangan yang akuntabel merupakan sinyal atau tanda bahwa daerah telah beroperasi dengan baik. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi daerah kepada investor ataupun kepada masyarakat sebagai wujud dari tanggungjawab atas pengelolaan daerah. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan sinyal kepada masyarakat juga investor (Girsang & Yuyetta, 2015). Sebelumnya untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah serta masyarakat, laporan keuangan akan di audit terlebih dahulu oleh pihak yang independen dalam hal ini adalah oleh BPK. Saat laporan keuangan telah di audit dan dipublikasikan kepada publik, maka publik akan mengartikan dan menganalisis informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*), sehingga semakin akuntabel laporan keuangan yang dipublikasikan oleh suatu entitas, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan entitas tersebut.

Hubungan antara teori sinyal dengan penelitian ini adalah tentang pentingnya memberikan informasi kepada publik sehingga dapat mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan informasi. Informasi laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk mengukur sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat.

### **2.2.1 Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan *agency theory*, dimana pemerintah dipandang sebagai *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi lebih mumpuni dibandingkan dengan *principal* menimbulkan asimetri informasi yang mendorong *agent* untuk melakukan tindak kecurangan seperti menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nuritomo & Rossieta, 2014), yang menguji politik dinasti terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Dibandingkan dengan daerah yang tidak mempraktikkan politik dinasti, daerah yang mempraktikkan politik dinasti ini cenderung untuk memiliki laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang akuntabel. Oleh karena itu, ada korelasi negatif atas opini laporan keuangan antar daerah dengan politik dinasti dengan daerah non politik dinasti. Permasalahan ini juga memicu munculnya kepala daerah dengan kompetensi yang rendah karena pemilu yang dihelat mempersulit hadirnya calon alternatif lain. Sehingga akhirnya memengaruhi kapabilitas mereka dalam mengelola dana publik untuk pembangunan ekonomi. Penelitian (Nuritomo & Rossieta, 2014), ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, Ragil, & Riharjo, 2017), yang menyatakan bahwa politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik dan cenderung memiliki akuntabilitas laporan keuangan daerah yang lebih rendah. Penelitian (Susilo & Pratolo, 2018) menunjukkan politik dinasti berkorelasi dan memiliki arah negatif terhadap akuntabilitas.

Berdasarkan pernyataan diatas, secara jelas menerangkan apabila daerah yang terindikasi politik dinasti ini cenderung memiliki pengaruh yang negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah karena hadirnya politik dinasti mempersempit alternatif calon pemimpin baru yang memengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola dana publik karena terkesan dipaksakan untuk memimpin daerah tersebut.

### **2.2.2 Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan teori sinyal, pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan sinyal berupa informasi laporan keuangan daerah kepada publik dengan tujuan untuk memberikan tanda apabila pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Informasi laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pemerintahan yang desentralisasi, idealnya memiliki ciri utama seperti, memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk mengenali dan memberdayakan sumber pendapatan keuangannya untuk mendanai administrasi publik dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan seperangkat aturan untuk mengelola dan mengaudit keuangan daerahnya desentralisasi fiskal juga diasumsikan dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2012)

Semakin tinggi derajat kemandirian daerah, maka semakin besar kemungkinan daerah akan memikul tanggung jawab yang tinggi dalam bentuk

opini laporan audit yang baik. Pemerintah daerah yang sangat mandiri diyakini dapat secara independen dalam mendanai pengeluaran dan kegiatan operasional untuk memastikan akuntabilitas, pemetaan, pelaporan, dan pengungkapan semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan dana publik (Mudhofar & Tahar, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fotanella & Rossieta, 2014) mengemukakan bahwa kemandirian daerah menunjukkan pengaruh positif terhadap kemungkinan daerah untuk memiliki opini audit yang baik dalam akuntabilitas laporan keuangannya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian (Mudhofar & Tahar, 2016) bahwa kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pernyataan di atas, menerangkan apabila kemandirian yang dimiliki suatu daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan karena semakin besar PAD suatu daerah, maka hal itu akan berdampak pada kelancaran memobilisasi dana kegiatan operasional pemerintah daerah. Selanjutnya, penyelenggaraan kegiatan operasional yang lancar, akan mendukung untuk terciptanya akuntabilitas yang baik karena selain diyakini dapat secara independen untuk mendanai pengeluaran juga dianggap dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.2.3 Pengaruh Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan teori sinyal, informasi laporan keuangan harus disampaikan sebagai tanda bahwa pemerintah telah menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Pada masa desentralisasi, idealnya pemerintahan yang baik mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

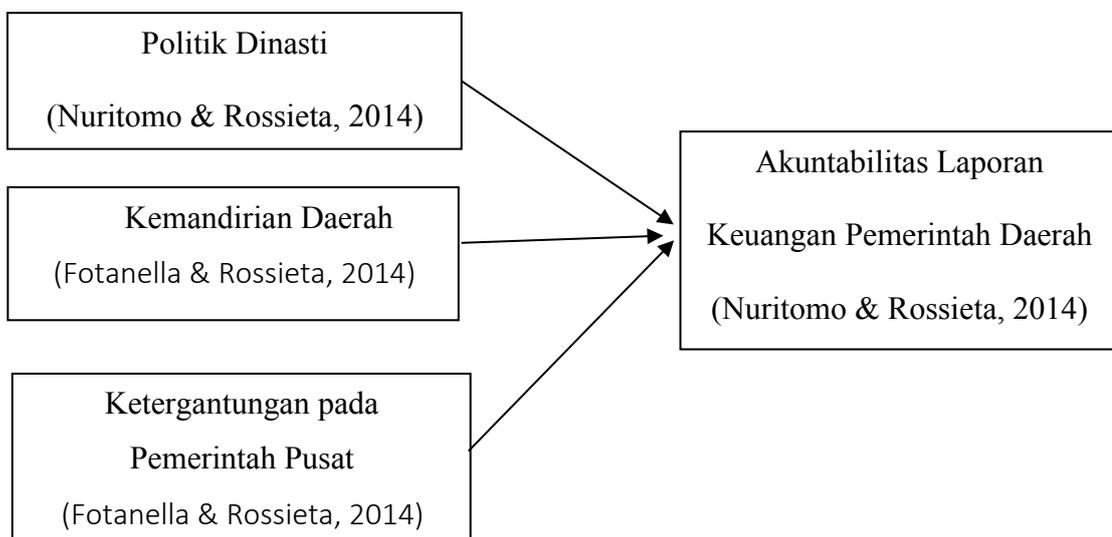
Ketergantungan pada pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan belanja maupun operasional pemerintah daerah rupanya mengurangi upaya otoritas daerah. Jumlah dana transfer yang besar dari pemerintah pusat berkorelasi negatif dengan peningkatan PAD, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerima dana pusat yang besar cenderung lebih “malas” dalam menerima dana dari PAD (Fotanella & Rossieta, 2014). Hal ini terlihat dari banyaknya pemerintah daerah yang pendapatannya sebagian besar masih berasal dari transfer dana pemerintah pusat. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fotanella & Rossieta, 2014), menyatakan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, maka semakin kecil kemungkinan Daerah tersebut memiliki akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi dalam bentuk opini audit yang baik. Begitu juga dengan hasil penelitian

(Irmawati, Febrian, & Pratolo, 2015), bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pernyataan di atas, secara jelas menerangkan apabila ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk opini audit karena daerah yang masih bergantung pada pusat cenderung memiliki akuntabilitas yang lebih rendah hal ini selaras dengan teori sinyal yang menemukan bahwa entitas cenderung melakukan penyampaian laporan keuangan yang kurang memadai ketika entitas tersebut memiliki akuntabilitas yang buruk.

#### 2.2.4 Paradigma Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Pemikiran**

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah dalam suatu penelitian, dimana rumusan masalah tersebut dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hal ini dianggap jawaban sementara karena jawaban yang diterima hanya berdasarkan teori yang relevan belum didasarkan pada bukti empiris yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data Sugiyono (2017:64).

Berdasarkan uraian dan hasil peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengambil hipotesis bahwa:

- H1** : Politik dinasti berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2** : Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3** : Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negative terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.